



Pengaruh Bantuan Sosial Bersyarat Program Keluarga Harapan terhadap Partisipasi Anak Usia Sekolah di Indonesia

Felicia Martsha¹, Disman²

Universitas Pendidikan Indonesia

*Correspondence: E-mail: martsha.felicia25@upi.edu

ABSTRACT

Poverty remains a significant issue in Indonesia, particularly affecting the access of school-age children to education. One of the government's efforts to address this is through the Conditional Cash Transfer program known as Program Keluarga Harapan (PKH). This study aims to analyze the impact of PKH on the educational participation of school-age children in Indonesia. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach, this research examines various studies on the correlation between PKH and educational participation. The findings indicate that PKH has a significant positive effect on increasing school enrollment rates, particularly at the elementary and junior high school levels, by providing financial support to underprivileged families. However, the impact on senior high school students is less pronounced, as many of them face economic pressures that compel them to enter the workforce. Other factors, such as access to technology and infrastructure, also play a role in enhancing education participation. The study concludes that while PKH contributes to reducing dropout rates, challenges remain, especially for students in remote areas and at the senior high school level. Therefore, more targeted interventions and stronger coordination with other educational support programs like Program Indonesia Pintar (PIP) and Bantuan Operasional Sekolah (BOS) are necessary to ensure comprehensive support for children's education.

© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 21 July 2024

First Revised 25 July 2024

Accepted 28 July 2024

First Available online 30 August 2024

Publication Date 31 October 2024

Keyword:

Program Keluarga Harapan,, School Age
Educational Participation, Cash Transfer,
Education

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi sebuah permasalahan yang penting bagi beberapa negara, khususnya di negara Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah yang penting karena menghambat kemajuan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Menurut data BPS Indonesia tahun 2021, kemiskinan di Indonesia masih di angka tinggi. Menurut BPS, pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta orang, yang berarti sekitar 10,14% dari total penduduk. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 7,89%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi, yaitu sebesar 13,10%. Garis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur status kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 adalah Rp 486.168 per kapita per bulan. Ini berarti bahwa seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya berada di bawah angka tersebut.

Menurut Todaro (2002), mayoritas penduduk di negara berkembang memiliki standar hidup yang sangat rendah. Standar ini diukur secara kualitatif dan kuantitatif, dengan indikator seperti pendapatan yang rendah, yang kemudian disebut sebagai kemiskinan, kondisi tempat tinggal yang tidak memadai, rendahnya tingkat pendidikan, buruknya layanan kesehatan, harapan hidup yang relatif pendek, terbatasnya kesempatan kerja, serta banyaknya situasi yang mencerminkan ketidakpuasan dan ketidakberdayaan secara umum (Todaro, 2002). Dengan kata lain, terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi anak-anak usia sekolah dalam mengakses pendidikan. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya akses ke fasilitas pendidikan yang memadai, serta kendala sosial dan geografis sering kali menghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini berakibat pada rendahnya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran kemiskinan di masyarakat.

Rendahnya partisipasi anak-anak usia sekolah adalah masalah signifikan karena pendidikan memiliki peran penting dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Melalui pendidikan, anak-anak dapat memperoleh keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan mereka dan keluarganya. Selain itu, pendidikan memberikan kesempatan untuk mobilitas sosial, memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mengurangi kesenjangan sosial. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan lebih berisiko menghadapi berbagai tantangan, seperti malnutrisi, akses terbatas ke layanan kesehatan, dan kondisi hidup yang buruk. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi sekolah di kalangan anak-anak menjadi langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Angka Partisipasi Murni Pendidikan (APM) Indonesia

Tahun	Jenjang Pendidikan	APM (%)
2014	SD/MI/PAKET A	99,45
	SMP/MTS/PAKET B	77,53
	SMA/MA/PAKET C	59,35
2015	SD/MI/PAKET A	96,70
	SMP/MTS/PAKET B	77,82
	SMA/MA/PAKET C	59,71
2016	SD/MI/PAKET A	96,82
	SMP/MTS/PAKET B	77,95
	SMA/MA/PAKET C	59,95
2017	SD/MI/PAKET A	97,19
	SMP/MTS/PAKET B	78,40
	SMA/MA/PAKET C	60,37

Sumber: BPS, 2017

Data pada Tabel 1. mencerminkan bahwa partisipasi pendidikan anak usia sekolah di Indonesia cukup baik di jenjang pendidikan dasar (SD), dengan cakupan yang hampir menyeluruh. Namun, di jenjang pendidikan menengah pertama dan atas, partisipasi menurun cukup signifikan. Tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi di tingkat SMP dan SMA, terutama untuk memastikan bahwa anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Apabila masalah rendahnya partisipasi anak-anak usia sekolah dibiarkan, konsekuensinya akan sangat merugikan, baik untuk individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Tanpa akses ke pendidikan, anak-anak akan kesulitan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga memperkuat siklus kemiskinan yang terus berlanjut. Situasi ini juga akan berdampak pada generasi mendatang, karena mereka yang hidup dalam kemiskinan biasanya tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi dalam pendidikan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah, yang mengakibatkan negara kesulitan untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif. Dengan produktivitas yang rendah, pertumbuhan ekonomi akan stagnan dan kesenjangan sosial semakin melebar. Masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan juga lebih rentan terhadap berbagai masalah sosial lainnya, seperti kesehatan yang buruk, peningkatan kejahatan, dan ketidakstabilan sosial.

Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup dilakukan melalui penyesuaian dan perbaikan dengan memberikan bantuan tunai langsung kepada mereka. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengusulkan strategi bantuan sosial langsung, yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai program bantuan tanpa syarat serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan tunai dengan syarat (Hossain, 2010).

Kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH), terutama di sektor pendidikan, memberikan peluang bagi anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Dengan demikian, anak-

anak dari keluarga kurang mampu dapat dengan lebih mudah mengakses layanan pendidikan sebagai peserta penerima manfaat PKH di bidang pendidikan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak PKH akan bervariasi di berbagai wilayah atau lokasi dengan kondisi yang berbeda (Nazara dan Rahayu et al., 2013). Analisis dampak PKH yang dilakukan oleh World Bank (2010) menunjukkan bahwa efek PKH lebih signifikan di daerah perkotaan, di mana tersedia lebih banyak fasilitas pendidikan yang memadai dibandingkan dengan daerah pedesaan. Di sisi lain, terdapat peningkatan akses pendidikan yang lebih tinggi di kalangan rumah tangga yang bukan peserta PKH, dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah non-PKH.

Hal ini diperkuat dengan studi yang dilakukan oleh Vianti dan Fauziah (2023) yang membahas tentang pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat, terhadap partisipasi pendidikan anak usia sekolah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Potensi Desa (PODES) tahun 2018. Analisis dilakukan dengan regresi logistik biner untuk melihat hubungan antara penerimaan bantuan PKH dengan tingkat partisipasi pendidikan anak dari kelompok usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hasil penelitian dalam studi yang dilakukan Vianti dan Fauziah menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia sekolah di berbagai jenjang pendidikan, terutama pada kelompok anak sekolah dasar. Selain PKH, variabel lain seperti akses telepon dan internet juga mempengaruhi tingkat partisipasi pendidikan anak. Penelitian ini juga membandingkan PKH dengan Program Indonesia Pintar (PIP) dan menunjukkan bahwa PIP memiliki peran lebih besar dalam mendorong partisipasi pendidikan anak sekolah.

Oleh karena itu, rumusan masalah yang ada dalam jurnal ini adalah “Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap partisipasi anak usia sekolah di Indonesia?” Sedangkan, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi anak usia sekolah di Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Partisipasi Pendidikan Anak Usia Sekolah

Pendidikan adalah sektor yang mendapat banyak perhatian dari pemerintah dan dipandang sebagai bagian penting dari pengeluaran publik. Negara-negara berkembang biasanya menyediakan akses dan pendanaan yang besar untuk pendidikan dasar hingga menengah (World Bank, 2018). Menurut Horngren (dalam Vianti dan Fauziah, 2023), pendanaan pendidikan, seperti yang diatur dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 46 ayat (1), menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai barang publik, yang berarti menjadi kewajiban pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi (Horngren dalam Vianti dan Fauziah, 2023). Jones (1985) menyebutkan bahwa biaya pendidikan terdiri dari biaya pribadi, yaitu biaya yang ditanggung individu, dan biaya sosial, yang dibiayai melalui pajak. Sebagian besar pengeluaran sekolah publik merupakan contoh biaya sosial (Jones, 1985).

Partisipasi pendidikan anak usia sekolah di Indonesia merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan pembangunan pendidikan di negara ini. Tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia menunjukkan tren positif seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti program Wajib Belajar 12 Tahun, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Kemdikbud, 2021). Selain itu, terdapat juga bantuan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, kendala dalam pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, serta mereka yang tinggal di kawasan perdesaan atau pulau-pulau terpencil seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan yang layak (Suryadarma & Jones, 2013).

Bantuan Sosial Bersyarat Program Keluarga Harapan

Keuangan publik mempelajari bagaimana pemerintah mengelola dana untuk membiayai kebijakan yang diterapkan. Menurut Musgrave dan Peacock, keuangan publik dikaitkan dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik (dalam Vianti dan Fauziah, 2023). Terdapat tiga isu utama dalam keuangan publik modern, yaitu jaminan sosial, pendidikan masyarakat, dan layanan kesehatan (Ulbrich, 2003). Oleh karena itu, kebijakan terkait pendapatan dan pengeluaran negara harus dievaluasi secara cermat (Musgrave dan Peacock, dalam Vianti dan Fauziah, 2023). Pengeluaran pemerintah bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan transparansi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya (Gruber, 2016; World Bank, 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan syarat tertentu sebagai salah satu bentuk program perlindungan sosial di Indonesia. Bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftarannya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021). Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan PKH (2021), besaran bantuan yang diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bervariasi sesuai dengan komponen sasaran penerima. Tidak seperti bantuan sosial lainnya, seperti BLT, besaran bantuan PKH untuk setiap KPM tidak disamakan. Sebagai contoh, bantuan di bidang pendidikan yang diberikan adalah Rp 900.000 untuk siswa SD, Rp 1.500.000 untuk siswa SMP, dan Rp 2.000.000 untuk siswa SMA.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan terkait dengan pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi pendidikan anak usia sekolah di Indonesia. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dan merangkum bukti dari berbagai studi sebelumnya secara sistematis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Melalui metode SLR, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak PKH terhadap partisipasi pendidikan anak usia sekolah,

sekaligus menyampaikan rekomendasi yang bermanfaat bagi kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Partisipasi Anak Usia Sekolah

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Bagi mereka, berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah pertama sudah dianggap pencapaian yang besar. Ini menunjukkan bahwa akses ke pendidikan yang baik masih menjadi masalah penting. Banyak anak dari keluarga berpenghasilan rendah mengalami berbagai kesulitan, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya fasilitas pendidikan, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, yang sering membuat mereka harus berhenti bersekolah lebih awal.

Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program bantuan. Contohnya, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dirancang untuk memberikan dukungan keuangan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program-program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan sehingga anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa melanjutkan sekolah.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan bantuan sosial bersyarat. PKH tidak hanya memberikan bantuan uang, tetapi juga mendorong keluarga penerima untuk memenuhi kewajiban tertentu terkait pendidikan anak-anak mereka. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, dengan harapan bahwa anak-anak dari keluarga miskin akan memiliki peluang lebih besar untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah inisiatif bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat PKH. Program ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2007 sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Di tingkat internasional, program ini dikenal dengan sebutan Conditional Cash Transfers dan telah terbukti efektif dalam mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan kronis. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tersedia di lingkungan mereka. Program ini juga bertujuan untuk membantu keluarga miskin mendapatkan akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, gizi, pangan, perawatan, serta program perlindungan sosial lainnya secara berkelanjutan. PKH diharapkan menjadi pusat unggulan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang dapat mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial secara nasional (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019).

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Pendidikan yang baik dapat membuka lebih banyak peluang di masa depan, baik dalam pekerjaan maupun kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan target untuk menurunkan angka putus sekolah di bawah satu persen di setiap jenjang pendidikan. Ini menunjukkan

komitmen pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia agar semua anak, tanpa melihat latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Dengan program-program ini, diharapkan partisipasi pendidikan di semua jenjang bisa meningkat dan angka putus sekolah dapat berkurang secara signifikan. Keterlibatan masyarakat, dukungan berbagai pihak, dan peningkatan kualitas pendidikan juga sangat penting untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang lebih merata dan inklusif di Indonesia.

Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Bersyarat Program Keluarga Harapan Terhadap Partisipasi Anak Usia Sekolah di Indonesia

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vianti dan Fauziah (2023) mengenai pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi pendidikan anak usia sekolah menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan data yang dianalisis (Tabel 2.) menggunakan regresi logistik biner, anak-anak dari keluarga penerima manfaat PKH cenderung memiliki peluang lebih besar untuk tetap bersekolah dibandingkan mereka yang tidak menerima bantuan. Di jenjang Sekolah Dasar (SD), anak-anak penerima PKH memiliki kecenderungan 1,69 kali lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) probabilitasnya meningkat sebesar 1,12 kali.

Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dampak PKH sedikit lebih kecil dibandingkan dengan tingkat sebelumnya, dengan probabilitas hanya 0,87 kali lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang SMA, terdapat tantangan yang lebih kompleks. Banyak anak dari keluarga miskin yang, meskipun mendapat bantuan, mungkin terpaksa bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga mereka sehingga mengurangi peluang mereka untuk terus bersekolah. Meskipun demikian, dampak PKH pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sangat signifikan, terutama dalam menekan angka putus sekolah.

Tabel 2. Hasil Regresi Logistik Biner dan Odds Ratio Partisipasi Anak Usia Sekolah

Variable	Coefficient			Odds Ratio		
	SD	SD-SMP	SD-SMA	SD	SD-SMP	SD-SMA
PKH	0,226*** (0,1940)	0,393*** (0,0986)	0,516*** (0,0831)	1,692*** (0,1547)	1,118*** (0,0665)	0,875*** (0,1393)
ART	-0,154 (0,1547)	-0,026 (0,0787)	1,306*** (0,0438)	1,167** (0,1806)	1,027** (0,0809)	0,270*** (0,118)
GEND	0,667*** (0,2398)	0,598*** (0,1178)	0,418*** (0,0786)	1,949*** (0,4676)	1,819*** (0,2143)	1,519*** (0,1195)
PEND_KRT	0,627** (0,4256)	1,327*** (0,3076)	0,245*** (0,1257)	1,872** (0,7970)	1,471*** (1,1605)	1,278*** (0,1608)
URBAN	0,416** (0,1724)	0,542*** (0,0856)	0,313*** (0,0718)	1,516** (0,2615)	1,220*** (0,1473)	1,068*** (0,0983)
EXP_CAP	0,613*** (0,1847)	0,905*** (0,0999)	0,921*** (0,0835)	1,847*** (0,3413)	2,473*** (0,2473)	2,512*** (0,2098)
FAC_EDU	0,000*** (0,0000)	0,000** (0,0000)	0,000*** (0,0000)	1,000** (0,0000)	0,999** (0,0000)	0,999*** (0,0000)
PHONE	0,009*** (0,1588)	0,429*** (0,0904)	0,034*** (0,0726)	0,690*** (0,1573)	0,850*** (0,0588)	0,996*** (0,0701)
INET	0,080*** (0,2688)	0,694*** (0,0925)	4,046*** (0,1134)	0,822*** (0,2480)	1,199*** (0,0461)	1,719*** (0,4899)
KIP	0,249** (0,2584)	0,372*** (0,1344)	11,431*** (0,3074)	1,921** (0,3317)	1,451*** (0,1950)	1,283*** (0,2832)
PIP	1,293*** (0,2946)	1,620*** (0,1676)	5,973*** (0,4847)	5,053*** (1,0737)	3,929*** (0,8471)	3,644*** (1,9047)
_cons	4,634*** (0,2794)	4,388*** (0,1470)	4,187*** (0,1141)	103,023*** (28,7921)	80,528*** (9,6786)	65,830*** (9,1901)

Sumber: Vianti dan Fauziah, 2023

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor lain, seperti akses informasi melalui telepon dan internet, turut mempengaruhi partisipasi pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang memiliki akses terhadap teknologi ini lebih cenderung melanjutkan sekolahnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun PKH penting, akses terhadap teknologi informasi juga dapat menjadi pendorong partisipasi pendidikan yang lebih baik, terutama di era digital saat ini.

Secara keseluruhan dalam penelitian ini, PKH berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia, namun masih terdapat tantangan, terutama di jenjang SMA. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih dalam upaya meningkatkan efektivitas program ini, terutama untuk kelompok usia sekolah menengah dan daerah yang akses pendidikannya masih terbatas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Dengan bantuan tunai bersyarat, PKH berhasil meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, sehingga anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus putus sekolah. Program ini memberikan dampak positif terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Bantuan yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang membutuhkan dukungan finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan. Bantuan ini memungkinkan keluarga

kurang mampu untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan anak-anak mereka, seperti seragam, buku, alat tulis, dan tas. Dengan adanya bantuan ini, anak-anak dari keluarga miskin dapat mengikuti pendidikan dengan lebih baik dan tidak merasa tertinggal dibandingkan teman-teman mereka yang memiliki akses lebih mudah terhadap perlengkapan sekolah.

Namun, meskipun PKH berdampak positif secara keseluruhan, masih terdapat tantangan besar, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Data menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada tingkat SMA masih jauh dari optimal. Banyak anak dari keluarga miskin terpaksa menghentikan pendidikan setelah lulus SMP karena berbagai faktor, seperti kebutuhan untuk bekerja, keterbatasan akses ke sekolah di daerah terpencil, atau kurangnya dukungan finansial yang memadai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PKH membantu mengatasi sebagian masalah, ada faktor lain yang harus diperhatikan dalam memastikan kelanjutan pendidikan anak-anak hingga jenjang SMA.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmaja dan Pangaribowo (2022). Hasil analisis menunjukkan bahwa PKH tidak memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah anak usia 7-18 tahun. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa PKH tidak secara signifikan menurunkan jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun, baik dari segi status sebagai pekerja anak maupun jumlah jam kerja. Namun, PKH terbukti mengurangi jumlah jam kerja pekerja anak perempuan sebanyak 16 jam dalam seminggu.

Tabel 3. Persentase APM dan APS Kelompok SD, SMP, dan SMA Pada Tahun 2018

2018			
Angka Partisipasi Murni	SD	SMP	SMA
	99,67%	77,11%	64,45%
2018			
Angka Partisipasi Sekolah	SD	SMP	SMA
	98,08%	94,79%	75,92%

Sumber: SUSENAS BPS Tahun 2018 (Data diolah)

Tabel 4. Penerimaan Manfaat PKH Bidang Pendidikan Tahun 2018

Penerimaan Manfaat PKH Bidang Pendidikan					
SD		SMP		SMA	
Penerima	Non-Penerima	Penerima	Non-Penerima	Penerima	Non-Penerima
18%	82%	19%	81%	18%	82%

Sumber: SUSENAS BPS Tahun 2018 (Data diolah)

Tabel 3. menunjukkan bahwa proporsi anak penerima PKH yang bersekolah relatif rendah dibandingkan dengan non-penerima pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA). Misalnya, hanya 18% penerima PKH di SD yang berpartisipasi dalam pendidikan dibandingkan 82% non-penerima, dan pola serupa terlihat pada SMP dan SMA. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa program PKH tampaknya tidak memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga penerima PKH, karena persentase partisipasi mereka cukup rendah dibandingkan dengan kelompok non-

penerima.

Mengapa Program Keluarga Harapan Kurang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Anak Usia Sekolah di Indonesia?

Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya partisipasi anak usia sekolah adalah kebijakan pendidikan gratis di tingkat dasar dan menengah. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pendidikan wajib belajar 12 tahun, yang mencakup biaya sekolah gratis untuk jenjang pendidikan dasar (SD) hingga menengah atas (SMA). Kebijakan ini memberikan akses pendidikan bagi sebagian besar anak-anak, termasuk mereka yang tidak menerima bantuan PKH, sehingga banyak anak tetap bisa bersekolah tanpa harus mengandalkan bantuan tunai dari PKH. Partisipasi tetap tinggi karena orang tua tidak perlu membayar biaya sekolah dasar secara langsung.

Di berbagai daerah, terutama di wilayah perkotaan atau daerah dengan infrastruktur pendidikan yang memadai, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan semakin meningkat. Banyak orang tua menyadari bahwa pendidikan adalah investasi penting untuk masa depan anak-anak mereka, terlepas dari apakah mereka menerima bantuan dari PKH atau tidak. Meskipun tidak semua keluarga miskin mendapatkan PKH, orang tua tetap memprioritaskan pendidikan anak mereka sebagai cara untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka di masa depan. Ini berkontribusi pada tingginya angka partisipasi sekolah.

Selain PKH, terdapat program bantuan pendidikan lain yang turut berkontribusi terhadap tingginya partisipasi sekolah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang memberikan dana kepada sekolah-sekolah untuk operasional pendidikan tanpa membebani orang tua. Terdapat juga Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan bantuan tunai langsung kepada siswa-siswa dari keluarga kurang mampu (di SD, SMP, SMA, dan SMK) untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka, seperti membeli seragam, buku, alat tulis, dan biaya sekolah lainnya. Ada juga beasiswa dari pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga swasta yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Banyak anak yang bisa bersekolah karena dukungan dari berbagai program pendidikan selain PKH. Kombinasi berbagai bentuk bantuan ini mendorong partisipasi yang tetap tinggi, meskipun penerima PKH hanya sebagian kecil.

Tabel 5. Perbandingan Contoh Program Pendidikan Lain Selain PKH

	DANA BOS	PIP	PKH
Sasaran	Dana BOS ditujukan langsung kepada sekolah-sekolah untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian alat tulis, perbaikan fasilitas, honor guru honorer, dan biaya kegiatan siswa.	IP memberikan bantuan tunai langsung kepada siswa-siswa dari keluarga kurang mampu (di SD, SMP, SMA, dan SMK) untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka, seperti membeli seragam, buku, alat tulis, dan biaya sekolah lainnya.	PKH ditujukan untuk keluarga sangat miskin dan mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu komponen PKH adalah bantuan pendidikan bersyarat untuk anak-anak dari keluarga penerima.
Tujuan	Meringankan biaya pendidikan bagi semua siswa dengan mendukung operasional sekolah	Mencegah anak putus sekolah dan membantu anak-anak dari keluarga miskin tetap	Membantu keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat, yang salah satu syaratnya adalah

	sehingga mengurangi beban orang tua dalam membayar biaya tambahan sekolah.	bersekolah dengan bantuan dana yang bisa digunakan untuk kebutuhan pendidikan.	anak-anak harus bersekolah secara teratur.
Manfaat	- Semua siswa di sekolah negeri bisa merasakan manfaatnya, karena sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan lebih baik tanpa membebankan biaya tambahan kepada orang tua. - Bersifat menyeluruh dan berlangsung setiap tahun sehingga konsisten dalam mendukung pendidikan.	- Dana langsung diberikan kepada siswa atau orang tuanya, sehingga keluarga bisa menggunakan bantuan tersebut untuk langsung membiayai kebutuhan pendidikan anak. - Fleksibilitas dalam penggunaan dana, karena bisa digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan yang spesifik bagi siswa.	- PKH memberikan bantuan multi-dimensi, tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. - Syarat bersekolah memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap berpartisipasi dalam pendidikan.
Kelebihan	- Menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan untuk seluruh siswa. - Meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitas pendidikan.	- Tepat sasaran, karena dana diberikan langsung kepada siswa yang membutuhkan. - Memberikan kemandirian kepada keluarga untuk mengelola dana sesuai kebutuhan.	- Pendekatan holistik, mencakup berbagai kebutuhan keluarga, sehingga keluarga dapat merasa lebih didukung secara menyeluruh. - Dorongan positif bagi keluarga untuk menyekolahkan anak-anak mereka karena bantuan ini bersyarat.
Kekurangan	Dana ini diberikan ke sekolah, bukan langsung ke siswa atau keluarga, sehingga jika tidak dikelola dengan baik, siswa mungkin tidak merasakan manfaatnya secara langsung.	- Ada potensi penyalahgunaan dana oleh keluarga jika tidak digunakan untuk pendidikan. - Dana yang diberikan tidak selalu mencukupi untuk menutupi semua biaya pendidikan, terutama di jenjang SMA atau SMK.	- Jumlah bantuan pendidikan mungkin lebih kecil dibandingkan kebutuhan biaya sekolah, terutama di tingkat yang lebih tinggi (SMA/SMK). - Fokus pada keluarga miskin yang terpilih, sehingga tidak semua anak miskin mendapat manfaatnya.

Selain PKH, program-program, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai program bantuan sosial lainnya juga memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pendidikan dan partisipasi anak usia sekolah.

Dalam banyak kasus, meskipun keluarga menerima bantuan dari PKH, jumlahnya mungkin tidak cukup besar untuk menutupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, terutama bagi keluarga yang sangat miskin. Hal ini berdampak kepada anak usia sekolah tetap putus sekolah meskipun mendapatkan bantuan. Bantuan dari PKH mungkin lebih banyak digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, atau

perumahan, yang dianggap lebih mendesak dibandingkan pendidikan. Akibatnya, keluarga mungkin lebih memprioritaskan anak-anak mereka untuk bekerja atau terlibat dalam aktivitas ekonomi lain untuk membantu keluarga daripada bersekolah. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang mendesak, anak-anak seringkali menjadi sumber tambahan penghasilan, terutama di lingkungan pedesaan atau keluarga yang bekerja di sektor informal.

Orang tua yang tidak memiliki pendidikan formal atau dengan tingkat pendidikan rendah mungkin kurang memahami manfaat jangka panjang dari pendidikan bagi anak-anak mereka. Orang tua yang tidak mengalami manfaat dari pendidikan formal dalam hidup mereka mungkin melihat pendidikan sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting untuk keberhasilan ekonomi anak-anak mereka, sehingga tidak mendorong anak untuk terus bersekolah. Pandangan ini diperkuat jika ada persepsi bahwa sekolah tidak membawa peningkatan langsung dalam kesejahteraan keluarga atau tidak menjamin peluang kerja di masa depan, terutama di daerah di mana peluang pekerjaan formal terbatas.

5. SIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) telah terbukti memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia sekolah di Indonesia, terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). PKH dirancang sebagai program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan insentif finansial kepada keluarga miskin, asalkan mereka memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah. Melalui PKH, keluarga yang kurang mampu mendapatkan dukungan untuk menutupi biaya pendidikan anak-anak mereka, yang pada gilirannya membantu mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga penerima PKH memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan anak-anak dari keluarga non-penerima. Di tingkat SD, partisipasi pendidikan anak-anak penerima PKH meningkat signifikan, dengan kecenderungan anak-anak untuk tetap bersekolah lebih besar 1,69 kali dibandingkan anak-anak yang tidak menerima PKH. Pada tingkat SMP, probabilitasnya meningkat sebesar 1,12 kali. Namun, di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dampak PKH mulai menurun, dengan probabilitas partisipasi hanya 0,87 kali lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang lebih kompleks pada jenjang SMA, di mana banyak anak dari keluarga miskin harus mulai bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga, sehingga mengurangi peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan.

Studi ini juga menggarisbawahi bahwa meskipun PKH memberikan dampak positif, program ini tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah partisipasi pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akses pendidikan terbatas dan kondisi sosial-ekonomi yang lebih kompleks. Di wilayah-wilayah ini, dukungan finansial saja mungkin tidak cukup untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural yang menghalangi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan peningkatan infrastruktur pendidikan, dukungan kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Implikasi Kebijakan:

- Kebijakan pendidikan harus fokus pada peningkatan partisipasi di jenjang SMA dengan menyediakan pendanaan dan bantuan yang lebih spesifik, termasuk program yang mendorong siswa tetap bersekolah tanpa terbebani oleh kebutuhan untuk bekerja.
- Penguatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil harus menjadi prioritas agar anak-anak di wilayah tersebut memiliki akses yang setara dengan anak-anak di perkotaan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dalam partisipasi pendidikan.
- Integrasi akses teknologi harus diperluas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, agar anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah mengikuti pendidikan dengan dukungan internet dan perangkat digital yang memadai.
- Sinergi antara program-program seperti PKH, PIP, dan BOS perlu ditingkatkan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan dukungan yang komprehensif, mencakup bantuan finansial, akses fasilitas pendidikan, dan dukungan sosial.

6. REFERENSI

Atmaja, A., & Pangaribowo, E.H. (2022). Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Partisipasi Sekolah dan Pekerja Anak Di Indonesia. Tesis, Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada.

Badan Pusat Statistik. (2018). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bappenas. (2020). Evaluasi Capaian Pembangunan Pendidikan 2020. Kementerian PPN/Bappenas.

Gruber, J. (2016). Public Finance and Public Policy. New York : Worth Publishers.

Hakam, D. F., Haryadi, F. N., Indrawan, H., Hanri, M., Hakam, L. I., Kurniawan, O., & Purnomoadi, A. P. (2024). Analyzing Current Trends in Career Choices and Employer Branding from the Perspective of Millennials within the Indonesian Energy Sector. *Energies*, 17(11), 2570.

Hossain, N. (2010). School Exclusion As Social Exclusion: The Practices And Effects Of A Conditional Cash Transfer Programme For The Poor In Bangladesh. *Journal of Development Studies*, 46(7), 1264–1282. <https://doi.org/10.1080/00220388.2010.487096>.

Jones, T. H. (1985). Introduction To School Finance: Technique and Social Policy. Prentice Hall.

Kemdikbud. (2021). Laporan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 Tahun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemensos. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Nazara, S. & Rahayu, S.K. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH): Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia.

Suryadarma, D., & Jones, G. W. (2013). Education in Indonesia. Institute of Southeast

Asian Studies.

Ulbrich, H. (2003). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: Routledge.

UNESCO. (2019). *Education and Inclusion in Indonesia: Global Education Monitoring Report*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Vianti, D.I & Fauziah. (2023). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Bersyarat Program Keluarga Harapan terhadap Partisipasi Pendidikan Anak Usia Sekolah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18(2). <https://doi.org/10.21002/jke.2023.07>.

World Bank. (2010).

World Bank. (2018).